

PEMBELAJARAN DEMOKRASI
DALAM MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DI SMP NEGERI 8 PEKANBARU

TESIS



OLEH
SUWARNI
NIM 10811

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
mendapatkan gelar Magister Pendidikan

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010**

ABSTRACT

Suwarni, 2010. Learning of Democracy in the Citizenship Education at Junior High School 8 Pekanbaru. Thesis. Graduate Program Padang State University.

This study aims to determine the Implementation of Learning Democratic Citizenship Education. PKn main mission is to establish a democratic citizen and responsible. The phenomenon of human character, democratic and accountable is an idealism that has not been fully realized. Education has not been able to equip students as a good citizen. The substance of the investment value - the value of democracy is no longer done through lectures, frequently asked questions, and discuss theories but is in the form of actual behavior as a manifestation of a culture of democracy practiced in the room - the classroom.

This study used a qualitative approach, data sources drawn from selected informants to the snowball sampling technique, data collection is carried out through the study of documents, interviews, observation, and data were analyzed with the method developed by Miles and Huberman: data reduction, data presentation, drawing conclusions.

Based on research conducted conclusions obtained: 1) Basically PKn teacher at Junior High School 8 Pekanbaru have performed well but learning about democracy in accordance with the planning of learning does not fit between the learning plan designed to implement class, the material is dominated by the cognitive aspects, lecture method, frequently asked questions, tasks, discuss the material in text books / BLM, the media is not supported by relevant, the assessment done by a written test descriptions for a daily test, multiple choice written test to test the middle of the semester and the semester, 2) PKn Teachers in Junior High School 8 Pekanbaru experiencing constraints in implementing the learning democracy both from teachers and from students. Limitations of time, effort should be collected at the same time as the beginning of the semester so that the less creative and innovative in planning learning membuar, difficulties in apersepsi, difficulty determining material kasus-kasus/kontektual, not master new methods, limitations of media and learning resources and the difficulty assessing attitudes, determine the format and how to manage it. Constraints of the students are students less active, less participation in class, 3) The efforts made by making the planning of learning to complement the administration of teachers, discipline in carrying out the study, discusses the constraints faced by peers, being democratic in the classroom, trying to do the assessment, although oriented to the cognitive aspects of the written test, considered absent, active students, but no appraisal document attitudes / behavior.

ABSTRAK

Suwarni, 2010. Pembelajaran Demokrasi Dalam mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 8 Pekanbaru. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, kendala – kendala dalam pelaksanaan pembelajaran demokrasi, upaya – upaya dalam pelaksanaan pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di SMP Negeri 8 Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data diambil dari informan yang dipilih dengan tehnik *snowball sampling*, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumen, lalu data dianalisis dengan metode yang dikembangkan Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: 1) Guru-guru PKn di SMP Negeri 8 Pekanbaru dalam melaksanakan pembelajaran demokrasi materi pembelajaran di dominasi fakta, konsep, belum dikaitkan dengan kasus atau masalah kontekstual, mendiskusikan buku teks dan LKS, tidak didukung media yang relevan, suasana kelas demokratis, penilaian kognitif dengan tes tertulis uraian untuk ulangan harian, tes tertulis pilihan ganda untuk ulangan tengah semester dan semester, 2) Kendala –kendala dalam pelaksanaan pembelajaran demokrasi adalah mengelola kelas, menentukan materi kasus-kasus atau masalah kontekstual, kurang menguasai metoda-metoda yang dapat membuat siswa aktif berpartisipasi di kelas, terbatasnya media/ sumber belajar yang ada, kendala dalam menilai sikap terutama menentukan format dan cara mengolahnya, 3) Upaya – upaya dalam melaksanakan pembelajaran demokrasi berusaha bersikap demokratis di kelas menghargai pendapat siswa, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif di kelas, menciptakan hubungan yang harmonis, berusaha mengatasi kendala dengan mendiskusikannya bersama teman sejawat di sekolah, maupun di MGMP PKn.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT seru sekalian alam, Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan berbagai pihak, tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Azmi, M.A, Ph.D. Sebagai Mantan Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang, dengan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd. M.Hum sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan sekaligus penguji yang telah memberikan bimbingan, arahan yang sangat berguna dalam penyelesaian tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Azwar Ananda, M.A, selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi, bantuan dengan tulus dan ikhlas selama penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Firman, M.S, selaku pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, arahan dengan tulus dan ikhlas sampai tesis ini selesai.

5. Bapak , ibu dosen penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran guna penyempurnaan tesis ini.
6. Bapak, ibu dosen pada program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang dan FKIP Universitas Negeri Riau khususnya dosen Pendidikan IPS yang telah begitu banyak memberikan pengetahuan dan wawasan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian tesis ini.
7. Kepala SMP Negeri 8 Pekanbaru dan Rekan-rekan guru maupun karyawan SMP Negeri 8 Pekanbaru yang telah banyak membantu penyelesaian tesis ini
8. Suami tercinta Kapten Tek Warno yang telah banyak memberikan dorongan, bantuan moral dan material dalam penyelesaian studi dan tesis ini.
9. Anak-anak tersayang Dyah Ulufi Anwardani dan Dyah Meilina Iswari yang selalu ikut memberikan motivasi guna menyelesaikan studi dan tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis masih jauh dari sempurna, dari penyajian dan substansi yang diungkapkan karena penulis mengakui keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki.

Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pekanbaru, Maret 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	i
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoritis	
1. Pembelajaran Demokrasi dalam Mata Pelajaran PKn	10
a. Hakikat Belajar dan Pembelajaran	10
b. Konsep Demokrasi.....	12
c. Pembelajaran Demokrasi	14
d. Demokrasi dalam Pendidikan	16
e. Demokrasi dalam Mata Pelajaran PKn	17
f. Pelaksanaan Pembelajaran Demokrasi dalam Mata Pelajaran Pendidikan dikan Kewarganegaraan	28
g. Komponen – komponen Pelaksanaan Pembelajaran Demokrasi ...	32
B. Penelitian yang Relevan	39
C. Kerangka Berfikir	40
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Informan Penelitian	44
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	44
E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data	49

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	54
B. Temuan Khusus	
1. Pelaksanaan Pembelajaran Demokrasi dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	63
2. Kendala - kendala Pelaksanaan Pembelajaran Demokrasi dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	79
3. Upaya-upaya Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran demokrasi dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	84
C. Pembahasan	85

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan.	110
B. Implikasi	111
C. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	118
-----------------------	------------

DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tentang Demokrasi	23
Tabel 2 Ruang Lingkup Isi Mata Pelajaran PKN	26
Tabel 3 Jumlah Buku Perpustakaan	57
Tabel 4 Kondisi Siswa	58
Tabel 5 Data Nilai UAS Mata Pelajaran PKn	59
Tabel 6 Nama – nama Guru PKn di SMP Negeri 8 Pekanbaru	60
Tabel 7 Komponen – komponen Pelaksanaan Pembelajaran Demokrasi	69
Tabel 8 Jenis – Jenis dan Isi Materi PKn	91
Tabel 9 Tabel Pembelajaran Efektif dan Bermakna	104
Tabel 10 Model Kisi-Kisi Skala Kepribadian sebagai Instrumen Penilaian Terhadap Aspek Kepribadian Peserta didik	107

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Kerangka Konseptual Pembelajaran Demokrasi dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	42
Gambar 2 Bagan Teknik Analisa Data	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	
Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	
Lampiran 3 Catatan Hasil Observasi Informan A	118
Lampiran 4 Catatan Hasil Observasi Informan B	123
Lampiran 5 Catatan Hasil Observasi Informan C	133
Lampiran 6 Catatan Hasil Observasi Informan D	136
Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan Wakasek Kurikulum	139
Lampiran 8 Hasil Wawancara Perencanaan Pembelajaran Informan A	141
Lampiran 9 Hasil Wawancara Perencanaan Pembelajaran Informan B	142
Lampiran 10 Hasil Wawancara Perencanaan Pembelajaran Informan C	143
Lampiran 11 Hasil Wawancara Perencanaan Pembelajaran Informan D	144
Lampiran 12 Hasil Wawancara Pelaksanaan Pembelajaran Informan A	145
Lampiran 13 Hasil Wawancara Pelaksanaan Pembelajaran Informan B	148
Lampiran 14 Hasil Wawancara Pelaksanaan Pembelajaran Informan C	151
Lampiran 15 Hasil Wawancara Pelaksanaan Pembelajaran Informan D	152
Lampiran 16 Hasil Wawancara dengan Siswa Kelas IX	156
Lampiran 17 Hasil Wawancara dengan Siswa Kelas VIII	157
Lampiran 18 Hasil Wawancara dengan Siswa Kelas VII	158
Lampiran 19 Hasil Wawancara dengan Siswa Kelas VII	159
Lampiran 20 Matrik Kontek Peristiwa	160
Lampiran 21 Matrik Daftar Cek Kelengkapan Data	161
Lampiran 22 Matrik Tata Waktu	163

Lampiran 23	Matrik Tata Peran	165
Lampiran 24	Matrik Pengaruh	166
Lampiran 25	Matrik Dinamika lokasi	168
Lampiran 26	Matrik Jaringan Kausal	169
Lampiran 27	Perencanaan Pembelajaran Demokrasi dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan	170
Lampiran 28	Pelaksanaan Pembelajaran Demokrasi dalam Mata Pelajaran Pendididikan Kewarganegaraan	171
Lampiran 29	Matrik Jaringan Kausal	172

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada proses, dan hasil pendidikan yang diharapkan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Berdasarkan visi pendidikan nasional, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI Nomor 20 tahun 2003).

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional diberlakukanlah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, Pemberlakuan KTSP tahun 2006 merubah paradigma pembelajaran terutama terhadap tugas guru yaitu dari mengajar ke pembelajaran. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap proses pembelajaran di kelas, pembelajaran berpusat kepada siswa, mengoptimalkan partisipasi peserta didik, dan guru lebih demokratis di dalam proses pembelajaran.

Di dalam KTSP 2006 yang diberlakukan di seluruh Indonesia salah satunya adalah kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru yaitu *Character and nation building* yang terdiri dari: (1) Aspek mental dan moral yang meliputi budi pekerti, disiplin, dan demokratis, (2) Aspek intelektual yang meliputi: keterampilan berfikir, fleksibel, orisinal, memperluas wawasan, profesionalisme, serta kreativitas.

Paradigma baru PKn merupakan bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah yang diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi. Dalam paradigma baru misi utama PKn adalah membentuk warga negara Indonesia yang baik dalam arti berkepribadian demokratis, mampu berpartisipasi dalam mewujudkan negara yang demokratis, kemanusiaan dan keadilan sosial. Misi yang demikian merupakan usaha pemberdayaan warga negara (*citizen empowerment*).

Fenomena bahwa manusia yang berkarakter, demokratis dan bertanggung jawab masih merupakan idealisme yang belum sepenuhnya terwujud, praktik pendidikan yang berlangsung baik di sekolah maupun di masyarakat belum menghasilkan manusia yang berkarakter, demokratis dan bertanggung jawab. Tindakan tidak demokratis dengan cara kekerasan, anarkhis, masih banyak dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Perilaku serupa terjadi juga di kalangan generasi muda dalam bentuk perkelahian sesama pelajar dan bentrokan fisik antara aparat keamanan dengan para pelajar ataupun mahasiswa. Kenyataan seperti ini merupakan salah satu indikator kegagalan pembelajaran demokrasi yang selama ini dilakukan.

Kegagalan pembelajaran demokrasi, dalam pandangan (Azyumardi Azra, 2001) dapat dilihat dalam tiga aspek yang saling terkait satu sama lainnya. Pertama, secara substantif, pelajaran PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) tidak dipersiapkan sebagai materi pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Kedua, secara metodologi pembelajarannya bersifat indoktrinatif, monologis, dan tidak partisipatoris. Ketiga, subjek material lebih bersifat teoritis dari pada praksis.

Kegagalan pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran PKn perlu diadakannya perubahan paradigma dalam PKn yang dikembangkan pada lembaga pendidikan, Kualitas pembelajaran harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Sejalan dengan paradigma baru pembelajaran dalam KTSP maka secara mikro, harus ditemukan strategi atau pendekatan pembelajaran yang efektif dan demokratis di kelas dalam mata pelajaran PKn, yang lebih

memberdayakan potensi peserta didik (*student concered*), siswa aktif bertanya, memberi tanggapan kritis dengan alasan yang tulus dan logis, terjadi dialog interaktif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa menghormati perbedaan pendapat, belajar memecahkan masalah sehari-hari yang sering dialami siswa, siswa belajar sabar menunggu giliran, sehingga terjadi praktek-praktek berdemokrasi di ruang-ruang kelas dalam upaya menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik.

Sekolah sebagai institusi pendidikan, perlu menciptakan kehidupan demokratis, melalui proses pembelajaran demokrasi, untuk membentuk warga negara yang demokratis. SMP Negeri 8 sebagai salah satu institusi pendidikan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan warga negara yang baik, demokratis dan bertanggung jawab, untuk itu diharapkan guru PKn melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan paradigma baru pembelajaran dalam KTSP maupun paradigma baru PKn, namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Pelaksanaan pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran PKn belum mendukung praktek demokrasi dalam ruang-ruang kelas, siswa kurang partisipatif, kurang terjadi interaksi dialogis antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa, siswa menerima pelajaran tanpa kritik, tidak ada perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi, siswa cenderung pasif sehingga belum mengalami demokrasi dalam proses pembelajaran PKn. Kenyataan tersebut berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis.

Berdasarkan pengamatan awal di SMP Negeri 8 Pekanbaru ditemukan fenomena yang menarik, fenomena tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Guru-guru SMP Negeri 8 Pekanbaru telah mengikuti sosialisasi, pelatihan sehubungan dengan KTSP dengan paradigma pembelajaran menghendaki siswa aktif, partisipasif, menyenangkan, guru sebagai fasilitator, mediator, namun paradigma baru pembelajaran KTSP belum sepenuhnya dilaksanakan, metoda ceramah masih mendominasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran,
2. Guru PKn melaksanakan pembelajaran dengan diskusi yang melibatkan siswa aktif, namun yang didiskusikan, materi dalam buku teks, LKS, yang didominasi materi kognitif, sehingga kondisi siswa cenderung pasif, menerima materi pelajaran tanpa kritik, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada dialog, ide-ide cemerlang, untuk memecahkan masalah kontekstual,
3. Dalam pelaksanaan pembelajaran PKn, Guru telah berusaha memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif, bertanya, memberikan tanggapan kritis, menjawab pertanyaan-pertanyaan, namun tidak semua siswa mau menggunakan kesempatan yang diberikan guru, yang terlibat aktif selalu siswa tertentu saja, itupun menjawab pertanyaan yang jawabannya ada dalam buku atau yang telah dicatat,
4. Pembelajaran yang dilakukan masih mengejar target kurikulum, untuk persiapan ujian tertulis (kognitif), menuntaskan materi-materi yang ada dalam buku teks / LKS untuk ulangan tertulis, sehingga kurang

dialogis, kurang melibatkan daya nalar siswa sendiri untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab,

5. Masih ada Peserta didik di kelas berperilaku kurang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, seperti: kurang menghargai pendapat temannya, suka mengejek, usil, mentertawakan temannya, kurang bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, (tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas), hal ini menjadi bahan pembicaraan guru sehari-hari.

Bertitik tolak dari fenomena-fenomena hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa Pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran PKn belum sesuai dengan apa yang seharusnya sehingga apa yang menjadi visi dan misi mata pelajaran PKn belum sepenuhnya terwujud, maka perlu perubahan paradigma dalam bidang materi, tidak kalah pentingnya perubahan dalam bidang paradigma metodologis. Apabila perubahan pada paradigma yang pertama diarahkan secara sistematis pada pengembangan wacana demokrasi yang berkeadaban dalam dinamika perubahan sosial yang berkembang, maka perubahan paradigma metodologis diarahkan untuk mengembangkan daya nalar peserta didik dalam kelas-kelas yang partisipatif, sehingga peserta didik benar-benar dapat mengalami demokrasi dalam proses pembelajaran PKn.

Fenomena-fenomena hasil pengamatan awal di SMP Negeri 8 Pekanbaru mendorong penulis untuk meneliti secara mendalam bagaimana pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran PKn di sekolah ini. Sesuai dengan profesi penulis

sebagai guru PKn, penulis ingin meneliti di SMP Negeri 8 Pekanbaru, Propinsi Riau.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran PKn di SMP Negeri 8 Pekanbaru, (2) Kendala-kendala apa yang dialami guru-guru PKn pada Pelaksanaan Pembelajaran Demokrasi dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 8 Pekanbaru, (3) Upaya – upaya apa yang dilakukan guru-guru PKn pada pelaksanaan pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran PKn di SMP Negeri 8 Pekanbaru.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan:

1. Pelaksanaan pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran PKn di SMP Negeri 8 Pekanbaru,
2. Kendala-kendala yang dialami guru-guru PKn pada pelaksanaan pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran PKn di SMP Negeri 8 Pekanbaru,
3. Upaya - upaya yang dilakukan guru PKn pada pelaksanaan pembelajaran demokrasi pada mata pelajaran PKn di SMP Negeri 8 Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran PKn untuk mengembangkan pembelajaran demokrasi, partisipatoris, dan efektif mengenai perencanaan, pengorganisasian dan penyajian materi serta metode dan evaluasinya, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi, sehingga pengakaran nilai-nilai demokrasi, dalam rangka membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis dan bertanggung jawab tercapai sesuai visi, misi, tujuan PKn maupun tujuan pendidikan nasional.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan :

1. Bagi guru maupun calon guru PKn untuk senantiasa mengembangkan wawasannya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional,
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di sekolah-sekolah khususnya di SMP Negeri 8 Pekanbaru,
3. Bagi forum guru mata pelajaran PKn (MGMP), memberikan masukan kepada guru-guru PKn dalam MGMP agar melaksanakan pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran PKn, dalam rangka membentuk manusia berkarakter, demokratis dan bertanggung jawab,

4. Bagi Peneliti hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data awal dalam penelitian lebih lanjut yang relevan terhadap permasalahan yang belum tersentuh dalam penelitian ini,
5. Bagi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian di SMP Negeri 8 Pekanbaru dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Guru-guru PKn di SMP Negeri 8 Pekanbaru dalam melaksanakan pembelajaran demokrasi materi pembelajaran terdiri dari fakta, konsep, belum dikaitkan dengan kasus atau masalah kontekstual, mendiskusikan buku teks dan LKS, tidak didukung media yang relevan, suasana kelas demokratis, penilaian kognitif dengan tes tertulis uraian untuk ulangan harian, tes tertulis pilihan ganda untuk ulangan tengah semester dan ulangan semester,
2. Kendala – kendala dalam pelaksanaan pembelajaran demokrasi adalah mengelola kelas, menentukan materi kasus-kasus atau masalah kontekstual, kurang menguasai metoda-metoda yang dapat membuat siswa aktif berpartisipasi di kelas, terbatasnya media/ sumber belajar yang ada, kendala dalam menilai sikap terutama menentukan format dan cara mengolahnya.
3. Upaya – upaya dalam melaksanakan pembelajaran demokrasi berusaha bersikap demokratis di kelas, menghargai pendapat siswa, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif di kelas, menciptakan hubungan yang harmonis, berusaha mengatasi kendala dengan mendiskusikannya bersama teman sejawat di sekolah, maupun di MGMP PKn.

B. Implikasi

Hasil penelitian pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 8 Pekanbaru dapat diungkapkan bahwa pembelajaran demokrasi dalam mata pelajaran PKn belum berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh guru-guru PKn di Sekolah ini.

Terlaksananya pembelajaran demokrasi dalam pembelajaran PKn harus didukung oleh berbagai komponen pembelajaran yang diorganisasikan sebagai sebuah sistim yang saling melengkapi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen –komponen dalam pembelajaran itu adalah mulai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian. Tujuan yang dirumuskan harus mengarah kepada aspek kognitif, afektif dan psikomotor, materi yang dipilih selain fakta, konsep, prinsip, prosedur, nilai, guru juga harus membaca fenomena-fenomena sosial yang berkembang berupa kasus-kasus atau masalah yang kontekstual, metoda lebih mengarah kepada pemecahan masalah/kasus-kasus, karena kehidupan siswa identik dengan masalah, siswa mempraktekkan dengan simulasi, demonstrasi, *roll playing*, guru harus demokratis di kelas maupun di luar kelas, guru memotivasi siswa dengan penghargaan (*reinforcement*), suasana kelas yang kondusif akrab, siswa harus aktif, kreatif, partisipatorik, siswa bebas mengemukakan gagasannya, interaksi dialogis antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, didukung oleh media/ sumber pembelajaran yang memadai, penilaian mengarah kepada ranah kognitif, afektif, psikomotor.

Kendala-kendala yang dialami guru – guru PKn harus dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, untuk itu peranan sekolah, dinas pendidikan perlu memfasilitasi dan mendukung kegiatan MGMP baik di sekolah maupun Kab/ Kota sebagai tempat berdiskusi bagi guru mata pelajaran sejenis dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran.

C. Saran

Dari temuan penelitian ini dikemukakan beberapa saran sebagai rekomendasi kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Guru-guru PKn di SMP Negeri 8 Pekanbaru dalam melaksanakan pembelajaran demokrasi perlu mengorganisasikan tujuan, materi, metoda/model pembelajaran , media, sumber belajar, partisipasi siswa, suasana pembelajaran, penilaian, sebagai sebuah sistem yang saling berhubungan satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran,
2. Guru – guru PKn dalam melaksanakan pembelajaran hendaknya mengaitkan materi dengan kasus-kasus atau masalah sehari-hari, metoda/model pembelajaran pemecahan masalah, analisis kasus, membuat keputusan (*decesion making*), *role playing*, menggunakan media yang relevan sesuai dengan fenomena-fenomena sosial yang sedang berkembang, memanfaatkan banyak sumber belajar sesuai prinsip “ alam takambang jadi guru”, menciptakan suasana harmonis, akrab, demokratis dalam pembelajaran, melakukan penilaian kognitif, afektif, psikomotor,

3. Siswa hendaknya terlibat aktif, kritis, menyampaikan pendapat secara benar dan bertanggung jawab, santun, menghormati pendapat yang berbeda, mampu bekerja sama dengan orang lain, kritis, demokratis dan bertanggung jawab,
4. Sekolah membentuk tim pengembang kurikulum, dan bekerja sama dengan tim pengembang kurikulum Kabupaten / Kota, tim pengembang kurikulum Propinsi guna mengatasi kendala – kendala yang di temui,
5. Dinas pendidikan kabupaten / kota memfasilitasi guru mata pelajaran sejenis (PKn) dalam suatu forum diskusi (MGMP) guna menemukan solusi dari kendala-kendala yang dihadapi para guru guna meningkatkan mutu pembelajaran,
6. Pembelajaran demokrasi tidak hanya dibebankan kepada mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), tetapi perlu ada kesamaan visi, misi untuk menjadikan prinsip-prinsip demokrasi sebagai “roh” yang mewarnai kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran apapun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional,
7. Substansi penanaman nilai - nilai demokrasi bukan lagi dilakukan melalui ceramah, mendiskusikan teori-teori melainkan sudah dalam bentuk perilaku nyata sebagai perwujudan kultur demokrasi, untuk itu perlu program lintas kurikulum sebagai wahana praktek berdemokrasi bagi peserta didik, seperti pembiasaan tradisi dialogis antara siswa dengan guru, siswa dengan pimpinan sekolah, dan siswa dengan warga sekolah lainnya secara santun, dan saling menghormati satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Siahaan, Khairuddin, Irwan Nasution, (2006). *Manajemen Pendidikan Berbasis sekolah*, Ciputat : Ciputat Press Group.
- Anita Lie, (2007), *Cooperative Learning, Mempraktikkan Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Aswandi, Maemunaty, Titi, (2005). *Belajar dan Pembelajaran*, Pekanbaru: Cendekia Insani.
- Buku panduan Penulisan Tesis dan Disertai, (2008) . PPS UNP: Padang.
- Depdiknas, (2003). *Standar Kompetensi mata pelajaran Kewarganegaraan* (Draft Final), Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- _____, (2003). *Pengelolaan Kurikulum Tingkat Sekolah*, Jakarta: Depdiknas.
- _____, (2003). *Kegiatan Belajar Mengajar Yang Efektif*, Jakarta: Depdiknas.
- _____, (2004). *Pedoman Pemilihan dan Pemanfaatan Bahan Ajar*, Jakarta: Depdiknas.
- _____, (2004). *Materi Pelatihan Terintegrasi Pengetahuan Sosial*, Jakarta: Depdiknas.
- _____, (2004). *Pedoman Pembelajaran Tuntas*, Jakarta: Depdiknas.
- _____, (2004). *Pedoman Diagnostik Potensi Peserta Didik* , Jakarta: Depdiknas
- _____, (2005). *Materi Pelatihan Terintegrasi Pendidikan Kewarganegaraan Strategi dan Metode Pembelajaran PKn*, Jakarta: Depdiknas.
- _____, (2005). *Pendekatan Contextual Teaching and learning*, Jakarta: Departemen Pendidikan nasional.
- _____, (2005). *Pengembangan Materi Kewarganegaraan dalam Berbagai Dimensi Keilmuan dan Aspek Kehidupan*, Jakarta: Departemen Pendidikan nasional.
- _____, (2005). *Praktek Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Portofolio*, Jakarta: Departemen Pendidikan nasional.